

## PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN PRIORITAS ISU PUBLIK

Bambang Aditio<sup>1</sup>, Nora Eka Putri<sup>2</sup>, Lince Magriasti<sup>3</sup>

Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang<sup>1,2,3</sup>

Email: [bambang.aditio@gmail.com](mailto:bambang.aditio@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 3	<i>Southeast Asia is one of the fastest-growing social media regions in the world, where digital platforms increasingly shape the formation and prioritization of public issues. This study aims to analyze the role of social media in promoting issues to the public and policy agendas, the factors influencing its effectiveness, and the structural limitations that constrain this process. The study applies Agenda Setting Theory and Framing Theory through a Systematic Literature Review (SLR) following the PRISMA 2020 guidelines. Literature was collected from Scopus, Web of Science, SAGE Journals, Taylor &amp; Francis Online, and Frontiers, focusing on open-access articles published between 2018 and 2026 that examined Indonesia and other Southeast Asian countries. A total of 10 articles met the inclusion criteria. The findings identify three major themes: issue mobilization and digital civic participation, issue framing and its influence on policy dynamics, and structural weaknesses including algorithmic bias, misinformation, and digital repression. Social media can serve as an effective agenda-setting catalyst; however, its influence remains highly dependent on the interaction of technological, political, and civic capacity factors.</i>
Nomor : 6	
Bulan : Juni	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
	<b>Keyword:</b> <i>agenda setting; framing theory; social media; public issues; digital activism; public policy.</i>

### Abstrak

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan pertumbuhan pengguna media sosial yang sangat pesat dan semakin berpengaruh dalam pembentukan serta prioritas isu publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media sosial dalam mendorong isu menjadi agenda publik dan kebijakan, faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta berbagai kelemahan struktural yang membatasi proses tersebut. Kajian menggunakan perspektif Agenda Setting Theory dan Framing Theory dengan metode Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA 2020. Literatur diperoleh dari Scopus, Web of Science, SAGE Journals, Taylor & Francis Online, dan Frontiers, dengan kriteria artikel open access periode 2018-2026 yang berfokus pada Indonesia dan Asia Tenggara. Sebanyak 10 artikel memenuhi kriteria. Hasil kajian mengidentifikasi tiga tema utama: mobilisasi isu dan partisipasi sipil digital, framing isu dan pengaruhnya terhadap kebijakan, serta kelemahan struktural berupa bias algoritmik, disinformasi, dan represi digital. Temuan menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi katalis agenda setting yang efektif, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada interaksi faktor teknologi, politik, dan kapasitas masyarakat sipil.

**Kata Kunci:** *agenda setting; framing theory; media sosial; isu publik; aktivisme digital; kebijakan publik*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat membentuk, menyebarkan, dan merespons berbagai isu

publik. Di kawasan Asia Tenggara, perubahan tersebut berlangsung sangat cepat seiring dengan tingginya tingkat adopsi internet dan media sosial. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 143 juta pengguna aktif media sosial atau lebih dari separuh jumlah penduduknya. Kondisi serupa juga terjadi di Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang termasuk negara dengan tingkat penetrasi media sosial tertinggi di dunia. Tingginya penggunaan platform digital menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah yang penting untuk memahami bagaimana teknologi komunikasi memengaruhi dinamika ruang publik dan proses demokrasi kontemporer.

Dalam perkembangannya, media sosial tidak lagi berfungsi semata sebagai sarana komunikasi antarindividu, tetapi telah menjadi ruang utama bagi pembentukan opini publik, mobilisasi gerakan sosial, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian digital di Indonesia, Malaysia, dan Filipina menunjukkan bahwa generasi muda memanfaatkan berbagai fitur platform, khususnya TikTok, untuk mengemas isu-isu publik seperti korupsi, pembatasan hak sipil, dan kebebasan akademik ke dalam format yang lebih menarik dan mudah menjangkau khalayak luas (Jalli, 2025). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena perjuangan simbolik yang memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung tanpa bergantung sepenuhnya pada media mainstream sebagai gerbang utama informasi.

Perubahan tersebut dapat dipahami melalui perspektif Agenda Setting Theory. Media memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat melalui tingkat eksposur dan penonjolan suatu informasi (McCombs, 2014). Dalam perkembangannya, agenda setting tidak hanya berkaitan dengan penentuan isu yang dianggap penting, tetapi juga mencakup pembentukan atribut atau karakteristik suatu isu. Pada era digital, proses penentuan agenda tidak lagi dimonopoli oleh institusi media, melainkan turut dilakukan oleh pengguna media sosial melalui konten viral, tagar populer, dan berbagai bentuk interaksi digital lainnya yang mampu menarik perhatian publik secara luas.

Perspektif lain yang relevan adalah Framing Theory yang menjelaskan bahwa komunikasi selalu melibatkan proses seleksi terhadap aspek-aspek tertentu dari realitas sehingga aspek tersebut menjadi lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya (Entman, 1993). Proses tersebut berpengaruh terhadap cara masyarakat mendefinisikan masalah, memahami penyebab, memberikan penilaian moral, dan mempertimbangkan solusi yang dianggap tepat.

Dalam lingkungan media sosial, pembingkai isu berlangsung secara terdesentralisasi karena melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Penelitian mengenai demonstrasi besar di Indonesia pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa berbagai kelompok masyarakat secara bersamaan membangun bingkai diagnostik, prognostik, dan motivasional untuk menjelaskan masalah, menawarkan solusi, serta mendorong tindakan kolektif (Abdurrahman, 2026). Melalui penggunaan tagar tertentu, isu tata kelola lembaga legislatif berhasil memperoleh perhatian luas dan masuk ke dalam agenda publik maupun agenda media nasional.

Indonesia menjadi salah satu konteks yang penting dalam kajian mengenai hubungan media sosial dan partisipasi publik. Penelitian (Suwana, 2020) mengenai gerakan Save KPK menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam aktivisme digital banyak dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman pribadi, keyakinan moral, dan munculnya kemarahan kolektif terhadap kondisi sosial tertentu. Mobilisasi yang terjadi melalui media sosial mampu meningkatkan perhatian publik terhadap isu pemberantasan korupsi sehingga isu tersebut memperoleh posisi yang lebih menonjol dalam diskursus nasional.

Meskipun demikian, pemanfaatan media sosial sebagai ruang partisipasi publik juga menghadapi berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan adanya paradoks dalam perkembangan aktivisme digital di Indonesia. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Namun di sisi lain, berbagai aktor politik memanfaatkan jaringan buzzer untuk membangun narasi tandingan, menyebarkan informasi yang menyesatkan, serta menciptakan tekanan terhadap kelompok-kelompok kritis (Pratamawaty, 2025). Kondisi tersebut menggambarkan kecenderungan meningkatnya praktik otoritarianisme digital yang memanfaatkan teknologi untuk mengendalikan ruang diskusi publik tanpa harus menutup akses terhadap platform digital secara langsung.

Permasalahan disinformasi semakin memperumit dinamika komunikasi politik di ruang digital. Temuan menunjukkan bahwa penyebaran hoaks selama Pemilu Indonesia 2024 tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat politik, tetapi juga menggeser perhatian publik dari isu-isu kebijakan yang substantif menuju narasi yang lebih sensasional (Syah et al., 2025). Fenomena tersebut sejalan dengan kecenderungan yang terjadi di berbagai negara Asia Tenggara. Kekhawatiran pemerintah terhadap penyebaran disinformasi sering kali dijadikan dasar untuk menerapkan regulasi digital yang pada praktiknya berpotensi

membatasi kebebasan berekspresi dan mengurangi ruang kritik terhadap pemerintah (Putra, 2024).

Dinamika media sosial di kawasan Asia Tenggara juga menunjukkan dimensi transnasional yang semakin kuat. Analisis Putra (2024) terhadap gerakan Milk Tea Alliance memperlihatkan bahwa solidaritas digital mampu melampaui batas negara dan menghubungkan masyarakat dari berbagai wilayah dalam memperjuangkan isu demokrasi dan hak asasi manusia. Gerakan tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan agenda publik tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat regional. Namun demikian, perkembangan tersebut sering direspons oleh pemerintah melalui pemanfaatan instrumen hukum dan regulasi digital untuk membatasi aktivitas kelompok-kelompok yang dianggap mengancam stabilitas politik.

penggunaan media sosial secara umum memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi politik masyarakat Indonesia. Namun, besarnya pengaruh tersebut dipengaruhi oleh karakteristik platform yang digunakan, tingkat literasi media pengguna, serta kondisi ekosistem informasi yang berkembang dalam suatu negara (Kurniawan et al., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas media sosial dalam membentuk agenda publik tidak dapat dipahami secara seragam dan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial serta politik masing-masing negara.

Selain faktor sosial dan politik, aspek algoritmik juga memiliki peran penting dalam pembentukan agenda publik. penelitian mengenai algoritma platform digital menunjukkan bahwa sistem rekomendasi cenderung mengutamakan konten yang mampu memicu respons emosional tinggi (Hastuti et al., 2025). Akibatnya, informasi yang bersifat sensasional, kontroversial, atau provokatif lebih mudah memperoleh visibilitas dibandingkan informasi yang membutuhkan pemahaman mendalam. Dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat konsumsi informasi digital yang tinggi, kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas diskusi publik dan proses pembentukan opini masyarakat.

gerakan sosial berbasis media sosial di Indonesia menemukan bahwa platform digital berperan penting dalam mempertemukan individu-individu yang sebelumnya tidak saling terhubung menjadi komunitas aksi kolektif yang lebih terorganisasi (Nugroho, 2025). Namun demikian, efektivitas gerakan digital dalam menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata masih bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan mobilisasi daring dengan aksi luring dan advokasi melalui saluran institusional yang formal.

Sementara itu, penelitian Wendratama (2025) mengidentifikasi pola partisipasi yang disebut *spectator collaboration* dalam aktivisme digital untuk kebebasan pers di Indonesia. Konsep tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyebaran suatu isu tidak hanya bergantung pada kelompok aktivis inti, tetapi juga ditentukan oleh kontribusi audiens yang terlibat secara pasif melalui aktivitas sederhana seperti membagikan konten, memberikan tanda suka, atau mengikuti diskusi publik. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai mekanisme pembentukan agenda publik di media sosial karena menunjukkan bahwa keterlibatan minimal dari kelompok masyarakat yang lebih luas tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan visibilitas suatu isu.

Meskipun berbagai penelitian telah menjelaskan hubungan antara media sosial, partisipasi politik, dan mobilisasi sosial, studi yang mengintegrasikan perspektif *Agenda Setting Theory* dan *Framing Theory* dalam konteks media sosial Asia Tenggara masih relatif terbatas. Oleh karena itu, tinjauan sistematis ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif bagaimana media sosial memengaruhi proses pembentukan agenda publik dan konstruksi makna isu-isu sosial politik di kawasan Asia Tenggara.

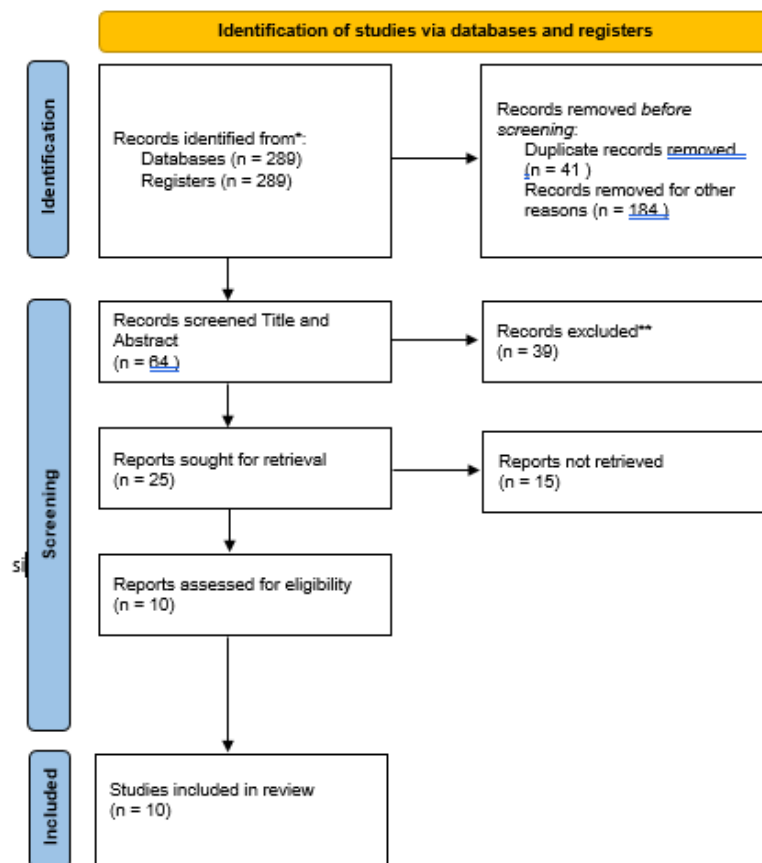
## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* dengan mengacu pada pedoman 2020. Pendekatan SLR dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis temuan-temuan empiris mengenai peran media sosial dalam pembentukan agenda publik, framing isu, dan aktivisme digital di kawasan Asia Tenggara. Proses pencarian literatur dilaksanakan pada bulan Juni 2026 melalui beberapa basis data ilmiah bereputasi internasional, yaitu Scopus, Web of Science (WoS), SAGE Journals, Taylor & Francis Online, dan Frontiers. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci berikut: "*social media*" AND "*agenda setting*" AND "*Southeast Asia*"; "*digital activism*" AND "*Indonesia*" AND "*public issue*"; "*framing*" AND "*social media*" AND "*policy*" AND "*Indonesia*"; "*social media*" AND "*public agenda*" AND "*ASEAN*".

Pencarian dibatasi pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2018–2026 untuk memperoleh gambaran perkembangan penelitian yang paling mutakhir terkait transformasi komunikasi digital dan dinamika agenda publik di kawasan Asia Tenggara. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel ditulis dalam Bahasa Inggris; (2) tersedia dalam akses terbuka (*open access*); (3) diterbitkan pada jurnal bereputasi yang terindeks

Scopus atau Web of Science; (4) menggunakan Indonesia atau negara-negara Asia Tenggara sebagai konteks utama penelitian.

Berdasarkan proses identifikasi, diperoleh 289 rekaman dari seluruh basis data. Setelah penghapusan duplikasi sebanyak 41 rekaman, tersisa 248 artikel untuk tahap penyaringan. Pada tahap penyaringan judul dan abstrak, sebanyak 184 artikel dieliminasi karena tidak relevan dengan fokus penelitian atau berada di luar konteks Asia Tenggara. Selanjutnya, 64 artikel dinilai melalui pembacaan teks penuh (*full-text review*). Dari jumlah tersebut, 54 artikel dikeluarkan dengan rincian: konteks penelitian eksklusif di luar Asia Tenggara (n = 21), tidak tersedia dalam akses terbuka (n = 18), dan topik tidak relevan dengan agenda setting maupun framing isu publik (n = 15). Dengan demikian, 10 artikel memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan sebagai sumber utama sintesis.



### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.2 Tabel Temuan Utama Artikel Inklusi

Penulis (Tahun)	Judul Ringkas	Temuan Utama
Jalli (2025)	Viral Justice: TikTok SEA	Aktivis di Indonesia, Malaysia, Filipina

		memanfaatkan trend-jacking dan meme untuk memperluas jangkauan isu serius. TikTok efektif memobilisasi publik muda, namun aktivis menghadapi harrasment, ancaman hukum, dan moderasi algoritma yang tidak konsisten.
Pratamawaty Digital Authoritarianism Indonesia (2025)		Media sosial memungkinkan kesadaran isu dan partisipasi sipil, namun jaringan buzzer yang dioperasikan secara politis menciptakan iklim ketakutan dan distorsi informasi. Aktivisme digital bersifat ambigu: memberdayakan sekaligus rentan terhadap represi halus dari negara.
Abdurrahman (2026)	Framing & Agenda Setting Demo Indonesia 2025	Tagar #BubarkanDPR dan #PotongPrivilege berfungsi sebagai perangkat agenda setting yang terdesentralisasi. Aktor sipil membangun diagnostic, prognostic, dan motivational frames secara kolektif. Media sosial memfasilitasi mobilisasi massal tanpa kepemimpinan tunggal.
Suwana (2020)	Save KPK Digital Activism	Motivasi intrinsik (kemarahan moral, identitas kolektif, kesadaran politik) menjadi pendorong utama aktivisme digital dalam gerakan Save KPK. Media sosial berhasil mempromosikan isu antikorupsi sebagai prioritas publik dan mendorong perubahan sikap pembuat kebijakan.
Putra (2024)	#MilkTeaAlliance SEA	Solidaritas digital lintas-negara di Asia Tenggara mampu membangun agenda isu HAM dan demokrasi melampaui batas negara. Legislative opportunism—regulasi sensor oleh pemerintah—menjadi ancaman sistematis terhadap keberlangsungan aktivisme digital di rezim non-demokratis.
Kurniawan et al. (2024)	SLR Meta-analisis SocMed & Partisipasi Politik Indonesia	Penggunaan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik di Indonesia. Efek ini dimediasi oleh literasi media

		dan kapasitas penalaran kritis. Platform berbeda menghasilkan pola pengaruh yang berbeda; efektivitas tidak universal.
Hastuti et al. (2025)	Algorithmic Influence & Media Legitimacy SLR	Algoritmisasi platform mengurangi otonomi editorial, mengamplifikasi konten emosional dan sensasional, memperkuat polarisasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap media. Konten bermuatan emosi tinggi secara konsisten mendapat distribusi lebih luas dibandingkan isu-isu substantif.
Nugroho (2025)	Digital Activism & Youth Participation Indonesia	Media sosial efektif sebagai katalis mobilisasi dan pembentukan identitas kolektif di kalangan aktivis muda Indonesia. Namun, gerakan murni-online rentan terdisolusi tanpa tindak lanjut offline; diperlukan jembatan antara aksi digital dan advokasi kebijakan formal.
Wendratama (2025)	Digital Activism Press Freedom Indonesia	Model spectator collaboration: kolaborasi antara aktivis inti dan penonton pasif menciptakan amplifikasi isu yang efektif. Advokasi kebebasan pers berhasil mendorong isu ke agenda publik, namun menghadapi hambatan berupa UU ITE dan surveillance digital terhadap jurnalis dan aktivis.
Syah et al. (2025)	Hoaks & Pemilu Indonesia 2024	Penyebaran hoaks di media sosial selama Pemilu 2024 secara sistematis mendistorsi agenda publik dengan mengalihkan perhatian dari isu kebijakan ke narasi sensasional. Pemerintah menghadapi tantangan regulasi yang dilematis: antara membatasi disinformasi dan melindungi kebebasan berekspresi.

### 3.3 Tabel Klasterisasi Temuan

Berdasarkan sintesis tematik, sepuluh artikel dikelompokkan ke dalam tiga klaster yang mencerminkan dimensi peran, faktor pendukung, dan kelemahan agenda setting berbasis media sosial di Asia Tenggara.

Tabel 4. Klasterisasi Temuan Penelitian

Klaster	Label	Artikel	Tema Inti	Mekanisme/Temuan Kunci
I	Mobilisasi Isu & Prioritas Agenda Publik	Jalli (2025); Abdurrahman (2026); Suwana (2020); Nugroho (2025)	Bagaimana publik mendorong isu menjadi prioritas via media sosial di SEA	Bottom-up agenda setting; hashtag sebagai agenda device; trend-jacking; spectator collaboration; mobilisasi berbasis motivasi intrinsik
II	Framing Isu & Dinamika Kebijakan	Abdurrahman (2026); Pratamawaty (2025); Kurniawan et al. (2024); Wendratama (2025)	Bagaimana pembingkaihan isu di media sosial memengaruhi respons kebijakan	Diagnostic/prognostic/motivational frames; frame contest asimetris negara-sipil; pengaruh signifikan pada partisipasi & kebijakan; spectator collaboration
III	Kelemahan Struktural Ekosistem Digital SEA	Syah et al. (2025); Hastuti et al. (2025); Pratamawaty (2025); Putra (2024)	Faktor-faktor yang melemahkan efektivitas agenda setting	Algoritmisasi & amplifikasi hoaks; buzzer & represi digital; legislative opportunism; UU ITE; disinformasi pemilu; polarisasi algoritmik

#### IV. PEMBAHASAN

##### 4.1 Klaster I — Mobilisasi Isu dan Pembentukan Prioritas Agenda Publik

Media sosial telah menjadi instrumen penting dalam mobilisasi isu publik di Asia Tenggara, terutama karena kemampuannya mempercepat penyebaran informasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam ruang publik digital. Berbeda dengan era media tradisional yang menempatkan media massa sebagai aktor utama dalam menentukan agenda publik, platform digital memungkinkan masyarakat, kelompok sipil, dan generasi muda untuk secara langsung mendorong isu tertentu menjadi perhatian publik dan pembuat kebijakan (Abdurrahman, 2026; McCombs, 2014). Berbagai gerakan digital di Indonesia menunjukkan

bahwa penggunaan tagar, kampanye daring, dan jejaring media sosial mampu meningkatkan visibilitas isu dalam waktu singkat sehingga menarik perhatian media arus utama maupun pemerintah (Abdurrahman, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa proses agenda setting semakin bersifat partisipatif, di mana publik tidak lagi hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk prioritas isu yang dibicarakan secara luas (Abdurrahman, 2026).

Keberhasilan mobilisasi isu melalui media sosial tidak hanya ditentukan oleh teknologi platform, tetapi juga oleh kemampuan suatu isu membangkitkan keterlibatan emosional masyarakat. Respons emosional seperti kemarahan, kepedulian, atau rasa solidaritas terbukti mampu mendorong individu untuk berpartisipasi dalam diskusi, menyebarkan informasi, serta terlibat dalam berbagai bentuk aksi kolektif di ruang digital (Suwana, 2020). Faktor emosional tersebut berperan sebagai mekanisme yang memperkuat identitas kolektif dan memperbesar peluang suatu isu memperoleh perhatian publik yang lebih luas (Suwana, 2020). Dengan demikian, efektivitas agenda setting di media sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor-aktor sosial dalam menghubungkan isu publik dengan nilai, pengalaman, dan emosi yang dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan algoritma platform digital mendorong munculnya berbagai strategi komunikasi yang semakin adaptif. Aktivistis dan kelompok advokasi di Indonesia, Malaysia, dan Filipina menunjukkan kemampuan yang semakin tinggi dalam memanfaatkan karakteristik platform untuk meningkatkan jangkauan pesan, termasuk dengan mengaitkan isu advokasi pada topik yang sedang populer atau banyak diperbincangkan publik (Jalli, 2025). Strategi tersebut memperbesar peluang isu memperoleh eksposur yang luas, namun juga menghadirkan tantangan berupa penyederhanaan persoalan yang kompleks ke dalam format komunikasi yang singkat dan mudah dibagikan. Akibatnya, terdapat ketegangan antara kebutuhan memperoleh viralitas dan kebutuhan menjaga kedalaman substansi dalam diskursus publik digital.

Selain dipengaruhi oleh strategi komunikasi, kekuatan agenda setting di media sosial juga bergantung pada keterlibatan berbagai lapisan pengguna. Pengaruh gerakan digital tidak hanya berasal dari kelompok aktivis inti yang secara aktif memproduksi konten, tetapi juga dari pengguna yang berpartisipasi melalui aktivitas sederhana seperti membagikan ulang informasi, memberikan dukungan simbolik, atau memperluas jangkauan pesan kepada jejaring sosial mereka (Nugroho, 2025). Pola partisipasi berlapis tersebut menciptakan efek amplifikasi yang memungkinkan suatu isu menjangkau audiens yang jauh lebih besar

dibandingkan kapasitas organisasi penggerakannya. Oleh karena itu, keberhasilan mobilisasi isu di Indonesia dan Asia Tenggara ditentukan oleh kombinasi antara resonansi emosional, kemampuan memanfaatkan logika algoritma platform, serta terbentuknya jaringan partisipasi yang luas dan saling memperkuat dalam ruang publik digital (Abdurrahman, 2026; Jalli, 2025; Nugroho, 2025)

#### Framing Isu dan Dinamika Kebijakan

keberhasilan suatu gerakan digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya menarik perhatian publik, tetapi juga oleh kemampuannya mempertahankan interpretasi tertentu terhadap isu yang diperjuangkan ketika berhadapan dengan narasi tandingan dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda (Abdurrahman, 2026). Dengan demikian, persaingan dalam ruang digital tidak lagi sekadar mengenai visibilitas isu, melainkan juga mengenai perebutan makna dan definisi atas realitas sosial yang kemudian memengaruhi persepsi publik maupun respons kebijakan (Abdurrahman, 2026).

Dalam konteks tersebut, hubungan antara aktor sipil dan aktor negara menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya yang cukup signifikan. Kelompok masyarakat sipil umumnya mengandalkan partisipasi sukarela, solidaritas kolektif, dan kredibilitas pesan untuk membangun dukungan publik, sementara aktor negara maupun kelompok politik yang memiliki kepentingan tertentu sering kali didukung oleh sumber daya komunikasi yang lebih besar, akses yang lebih luas terhadap media arus utama, serta instrumen regulasi yang dapat memengaruhi dinamika diskursus publik (Pratamawaty, 2025). Kondisi ini menciptakan ruang digital yang tidak selalu kompetitif secara setara dan berpotensi memperkuat kecenderungan kontrol informasi yang berlangsung secara bertahap melalui mekanisme yang lebih halus dibandingkan bentuk-bentuk pembatasan konvensional (Pratamawaty, 2025).

Di sisi lain, efektivitas framing tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan karakteristik audiens yang menjadi sasaran komunikasi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik dan keterlibatan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi media, kualitas ekosistem informasi, serta karakteristik platform yang digunakan (Kurniawan et al., 2024). Karena itu, strategi komunikasi yang berhasil dalam suatu konteks belum tentu menghasilkan dampak yang sama pada konteks yang berbeda. Pengalaman Indonesia juga memperlihatkan bahwa framing yang mampu menjangkau kelompok audiens yang beragam biasanya tidak hanya menawarkan argumentasi yang kuat, tetapi juga membangun keterhubungan emosional yang memungkinkan masyarakat merasa

memiliki kepentingan terhadap isu tersebut, bahkan ketika mereka tidak terdampak secara langsung (Wendratama, 2025).

Secara keseluruhan, pemingkakan isu yang efektif dalam memengaruhi agenda kebijakan di Asia Tenggara memerlukan kemampuan membaca dinamika kekuasaan, membangun dukungan lintas kelompok, dan mempertahankan narasi di tengah munculnya berbagai interpretasi yang bersaing. Selain itu, keragaman budaya, bahasa, dan pengalaman sosial di kawasan ini menunjukkan bahwa narasi yang berakar pada nilai-nilai lokal, identitas komunitas, dan pengalaman sehari-hari masyarakat cenderung lebih mudah diterima dibandingkan narasi yang terlalu umum atau bersifat universal. Oleh karena itu, keberhasilan framing tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan konteks sosial dan budaya tempat pesan tersebut beredar.

#### 4.3 Klaster III — Kelemahan Struktural Ekosistem Digital Asia Tenggara

Sejumlah kajian mengindikasikan bahwa desain platform digital tidak selalu mendukung terbentuknya ruang diskusi publik yang sehat karena algoritma cenderung memprioritaskan konten yang mampu menghasilkan keterlibatan tinggi, terutama yang memicu reaksi emosional kuat (Hastuti et al., 2025). Akibatnya, isu-isu yang kompleks, membutuhkan penjelasan mendalam, atau memerlukan pertimbangan yang lebih kritis sering kali kalah bersaing dengan konten yang bersifat sensasional dan mudah menarik perhatian pengguna. Kondisi tersebut menciptakan tantangan serius bagi proses pembentukan agenda publik yang berbasis pada informasi yang akurat dan deliberatif.

Permasalahan tersebut semakin terlihat dalam dinamika politik elektoral di Indonesia. Arus informasi yang dipenuhi hoaks, misinformasi, dan narasi manipulatif berpotensi menggeser perhatian publik dari pembahasan kebijakan yang substantif menuju isu-isu yang lebih kontroversial dan emosional (Syah et al., 2025). Dalam situasi seperti ini, pemerintah menghadapi dilema yang tidak sederhana. Upaya mengendalikan penyebaran informasi yang menyesatkan diperlukan untuk menjaga kualitas ruang publik digital, namun kebijakan yang terlalu represif juga berisiko membatasi kebebasan berekspresi dan mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah (Syah et al., 2025).

Tantangan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi kecenderungan yang terlihat di berbagai negara Asia Tenggara. Kekhawatiran terhadap penyebaran disinformasi kerap digunakan sebagai dasar untuk memperluas regulasi ruang digital, yang dalam praktiknya dapat berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat sipil dan gerakan advokasi daring (Putra, 2024). Pada saat yang sama, efektivitas aktivisme digital juga

menghadapi keterbatasan internal. Mobilisasi yang hanya mengandalkan interaksi daring sering kali sulit mempertahankan momentum dalam jangka panjang apabila tidak didukung oleh keterlibatan dengan institusi formal, media arus utama, maupun jaringan organisasi yang mampu menerjemahkan tuntutan publik ke dalam proses kebijakan yang nyata (Nugroho, 2025). Karena itu, pengaruh media sosial terhadap perubahan kebijakan tidak dapat diasumsikan berlangsung secara otomatis hanya karena suatu isu berhasil menjadi viral.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola ruang digital memerlukan pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan kebebasan berekspresi dan upaya menjaga kualitas informasi publik. Transparansi dalam pengelolaan algoritma platform, perlindungan hukum bagi partisipasi sipil di ruang digital, peningkatan literasi media masyarakat, serta pengembangan mekanisme kelembagaan yang mampu menghubungkan aspirasi publik dengan proses pengambilan keputusan menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana demokratisasi yang efektif, bukan sekadar ruang kompetisi perhatian yang rentan terhadap manipulasi informasi (Hastuti et al., 2025; Putra, 2024).

#### **D. KESIMPULAN**

Tinjauan literatur sistematis ini, berdasarkan sepuluh artikel inklusi yang seluruhnya berfokus pada konteks Asia Tenggara dan Indonesia, menghasilkan tiga kesimpulan utama:

Pertama, media sosial berperan nyata sebagai katalis agenda setting yang mendorong isu publik menjadi prioritas kebijakan di Asia Tenggara. Mekanismenya mencakup: (a) amplifikasi bottom-up isu melalui tagar, meme, dan konten viral; (b) mobilisasi koalisi sipil multi-aktor yang terorganisasi; dan (c) pembingkaihan isu secara terdesentralisasi oleh warga biasa yang menjadikan mereka ko-produser wacana publik. Kasus-kasus dari Indonesia—mulai dari Save KPK hingga demonstrasi 2025—menunjukkan konsistensi pola ini di sepanjang waktu.

Kedua, efektivitas agenda setting berbasis media sosial didukung oleh resonansi emosional isu, koalisi sipil yang inklusif, literasi platform yang kreatif, dan momentum politik. Namun faktor-faktor ini beroperasi dalam konteks spesifik yang tidak dapat direplikasi secara universal: kondisi ekosistem media, tingkat kebebasan sipil, dan karakteristik hubungan negara-masyarakat di setiap negara menentukan batas-batas kemungkinan efektivitas media sosial sebagai instrumen perubahan kebijakan.

Ketiga, ekosistem digital Asia Tenggara menghadapi kelemahan struktural yang serius: algoritmisasi yang mengamplifikasi hoaks dan konten emosional di atas isu substantif; jaringan buzzer dan operasi pengaruh yang diorganisasi oleh aktor negara; regulasi digital yang digunakan sebagai alat pembungkaman (*legislative opportunism*); dan keterbatasan intrinsik gerakan digital-only untuk menghasilkan dampak kebijakan jangka panjang. Kelemahan-kelemahan ini bukan semata-mata masalah teknis, melainkan tantangan tata kelola yang memerlukan respons hukum, kelembagaan, dan pendidikan secara bersamaan.

Keterbatasan penelitian ini meliputi dominasi studi dengan konteks Indonesia, yang meskipun relevan juga mengurangi representasi negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, basis data pencarian yang berfokus pada publikasi berbahasa Inggris berpotensi mengabaikan literatur akademis lokal yang relevan dalam bahasa Indonesia, Melayu, atau Thai. Agenda riset mendatang sebaiknya memperluas cakupan ke negara-negara ASEAN non-demokratis (Vietnam, Kamboja, Myanmar), mengkaji platform tertutup (WhatsApp, Telegram) sebagai medium agenda setting informal, serta mengembangkan kerangka evaluasi yang dapat mengukur durabilitas dampak kebijakan dari gerakan digital.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2026). Social media and political protest: Framing and agenda-setting in the Indonesian demonstrations, August 2025. *Online Information Review*, 50(3), 541–563. <https://doi.org/10.1108/OIR-10-2025-0809>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Hastuti, H., Maulana, H. F., Lawelai, H., & Suherman, A. (2025). Algorithmic influence and media legitimacy: A systematic review of social media's impact on news production. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1667471>
- Jalli, N. (2025). Viral justice: TikTok activism, misinformation, and the fight for social change in Southeast Asia. *Social Media + Society*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/20563051251318122>
- Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social media's influence on political participation: Insights from a systematic review and meta-analysis in Indonesian psychology. *Jurnal Psikologi*, 51(3), 336–355. <https://doi.org/10.22146/jpsi.101469>
- McCombs, M. (2014). *Setting the agenda: Mass media and public opinion* (2nd ed.). Polity Press.

- Nugroho, B. H. (2025). Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(10), 91–105. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603>
- Pratamawaty, B. B. (2025). Social media activism and digital authoritarian drift in flawed democracies: The case of Indonesia. *Dialogues on Digital Society*. <https://doi.org/10.1177/29768640251383985>
- Putra, B. A. (2024). Digital activism in Southeast Asia: The #MilkTeaAlliance and prospects for social resistance. *Frontiers in Sociology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1478630>
- Suwana, F. (2020). What motivates digital activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia. *Information, Communication and Society*, 23(9), 1295–1310. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1563205>
- Syah, R. F., Ekawati, E., Azanda, S. H., Syafarani, T. R., Ayunda, W. A., Zulkifli, M. Y., Rahma, N. M., & Kusumawardani, A. (2025). Hoax and election: The role of social media and challenges for Indonesian government policy. *Studies in Media and Communication*, 13(2), 294–305. <https://doi.org/10.11114/smc.v13i2.7486>
- Wendratama, E. (2025). Digital activism for press freedom advocacy in post-authoritarian Indonesia. *Media*, 6(3). <https://doi.org/10.3390/journalmedia6030101>